

Nama	Kelas:
------	--------

PKN8_BAB 2(4) UUD 1945 KONSTITUSI NRI

4. Sidang Pertama PPKI Pengesahan Rancangan UUD (18 Agustus 1945)

Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan sidang utamanya yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Pejambon, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Ir. Soekarno bersama Drs. Mohammad Hatta dengan tujuan utama meletakkan fondasi ketatanegaraan serta membentuk alat kelengkapan negara bagi Republik Indonesia yang baru berdiri.

a. Agenda Pertama: Pengesahan Undang-Undang Dasar

Agenda pertama berfokus pada pembahasan, penyempurnaan, dan pengesahan naskah konstitusi negara yang menjadi hukum dasar tertulis Republik Indonesia.

- **Penyempurnaan Naskah Pembukaan UUD:**

Sebelum disahkan, dilakukan perubahan penting terhadap naskah Piagam Jakarta yang akan dijadikan Pembukaan UUD 1945. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari keberagaman latar belakang, kalimat pada sila pertama yang semula berbunyi "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" diubah menjadi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*".

- **Pengesahan Batang Tubuh UUD:**

Rancangan Batang Tubuh hasil kerja rumusan BPUPKI disempurnakan dan disahkan menjadi pasal-pasal konstitusi resmi. Beberapa pasal disesuaikan, termasuk ketentuan syarat Presiden Indonesia.

- **Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara:**

Dengan disahkannya Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, maka lima sila Pancasila secara resmi sah dan legal menjadi dasar negara Republik Indonesia.

b. Agenda Kedua: Susunan Pemerintahan Menurut Pandangan Prof. Dr. Mr. Soepomo

Agenda kedua membahas rancangan tata bangunan negara dan sistem tata pemerintahan yang berlandaskan pada pemikiran Prof. Dr. Mr. Soepomo mengenai prinsip kekeluargaan dan kedaulatan rakyat.

- **MPR sebagai Pemegang Kedaulatan Rakyat:**

Kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.

- **Komposisi Keanggotaan MPR:**

Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan daerah serta utusan golongan.

- **Kedudukan Presiden di Bawah MPR:**

Presiden berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bertindak sebagai mandataris majelis untuk menjalankan roda pemerintahan

- **Peran Menteri Negara:**

Dalam menjalankan tugas-tugas eksekutif harian, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang memimpin departemen pemerintahan.

- **Pemerintahan Daerah:**

Di bawah struktur pemerintahan pusat, dibentuk pemerintahan daerah untuk mengelola wilayah Indonesia secara efisien dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Agenda Ketiga: Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta Pembentukan KNIP

Agenda ketiga menyelesaikan penetapan pimpinan eksekutif pertama serta pembentukan lembaga pembantu presiden sebelum terbentuknya badan legislatif permanen hasil pemilu.

- **Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pertama:**

Atas usulan dari Otto Iskandardinata, sidang sepakat memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia secara aklamasi.

- **Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat:**

Dikarenakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum dapat dibentuk melalui pemilihan umum, sidang memutuskan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

- **Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat:**

Lembaga ini bertugas membantu pekerjaan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan sebelum terbentuknya DPR dan MPR secara resmi.

Tabel Ringkasan Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945

Agenda Sidang	Keputusan Utama	Tokoh / Pengusul Terkait
Agenda 1: Pengesahan UUD	Mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 serta mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara.	Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta
Agenda 2: Susunan Pemerintahan	Menetapkan sistem ketatanegaraan (MPR pemegang kedaulatan, Presiden di bawah MPR dibantu menteri, dan struktur pemda).	Prof. Dr. Mr. Soepomo
Agenda 3: Kepemimpinan & KNIP	Mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden & Wapres serta membentuk KNIP.	Otto Iskandardinata

Latihan Pemahaman Materi

I. Kuis Pilihan Ganda

Klik Link/Tautan ini untuk latihan pemahaman materi diatas:

https://gemini.google.com/share/d/lcTeN8_MxIkF5CqWLTv_QBDTP1WigvHiv?usp=sharing

II. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

SOAL PKN8 SIDANG PENGESAHAN RANCANGAN UUD

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat!

1. Sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilaksanakan pada...
 - A. 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56
 - B. 18 Agustus 1945 di Gedung Pejambon
 - C. 19 Agustus 1945 di Gedung DPR/MPR
 - D. 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In
2. Perubahan rumusan Sila Pertama Pancasila dari "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" bertujuan untuk...
 - A. Memenuhi syarat dari pihak Jepang
 - B. Menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia
 - C. Mempercepat proses pengesahan UUD 1945
 - D. Mengikuti sistem ketatanegaraan luar negeri
3. Perubahan isi Pasal 6 UUD 1945 mengenai syarat Presiden Republik Indonesia yang disahkan pada sidang PPKI adalah...
 - A. Dari "Orang Indonesia asli yang beragama Islam" menjadi "Orang Indonesia asli"
 - B. Dari "Orang Indonesia asli" menjadi "Warga Negara Indonesia usia minimal 40 tahun"
 - C. Dari "Dipilih oleh rakyat" menjadi "Diangkat oleh PPKI"
 - D. Dari "Orang Indonesia asli" menjadi "Siapa saja yang lahir di Indonesia"
4. Tokoh bangsa yang menginisiasi pembahasan perubahan Sila Pertama Pancasila setelah menerima aspirasi dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur adalah...
 - A. Ir. Soekarno
 - B. Mr. Soepomo
 - C. Drs. Mohammad Hatta
 - D. Otto Iskandardinata
5. Menurut konsep tata negara Prof. Dr. Mr. Soepomo yang disepakati dalam sidang PPKI, lembaga pemegang kedaulatan rakyat tertinggi adalah...
 - A. Presiden
 - B. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - C. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
 - D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
6. Berdasarkan konsep Prof. Dr. Mr. Soepomo, keanggotaan MPR terdiri atas...
 - A. Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri
 - B. Seluruh anggota PPKI dan KNIP
 - C. Anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan
 - D. Gubernur dan kepala daerah seluruh Indonesia
7. Dalam struktur pemerintahan pusat hasil keputusan sidang PPKI, hubungan kerja antara Presiden dan menteri-menteri negara adalah...
 - A. Menteri berada di atas Presiden dan mengawasi Presiden
 - B. Menteri bertindak sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan
 - C. Menteri bertanggung jawab langsung kepada DPR
 - D. Menteri dipilih langsung oleh MPR tanpa campur tangan Presiden

8. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama RI dilakukan secara aklamasi atas usulan dari...

- A. Mr. Mohammad Yamin
- B. Radjiman Wedyodiningrat
- C. Otto Iskandardinata
- D. Mr. Soepomo

9. Tugas utama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah...

- A. Menggantikan tugas dan wewenang Presiden sepenuhnya
- B. Membantu pekerjaan Presiden selama masa peralihan
- C. Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar baru
- D. Mengelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia

10. Pembentukan KNIP pada awal kemerdekaan diperlukan karena...

- A. Lembaga resmi seperti MPR dan DPR belum terbentuk secara sempurna
- B. Presiden membutuhkan badan militer khusus
- C. Susunan kabinet menteri ditolak oleh PPKI
- D. Wilayah Indonesia belum dibagi menjadi provinsi

III. Esai

Jawab pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!

1. Mengapa perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 sangat penting bagi keutuhan bangsa Indonesia?

2. Sebutkan keanggotaan MPR dan kedudukan Presiden terhadap MPR berdasarkan konsep tata pemerintahan Prof. Dr. Mr. Soepomo!

3. Apa alasan utama dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat segera setelah pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden?